PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP BELANJA MODAL DAN IMPLIKASINYA PADA BELANJA PEMELIHARAAN
(Studi Pada Pemerintah Kota Cirebon)

Novia Nur Putriasani
(21110064)
Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Capital expenditure is the expenditure made by the local government for the acquisition of fixed assets. To keep the fixed assets can be used in accordance with the estimated economic life required the provision of maintenance budget. To support the availability of allocation of funds for capital expenditure and maintenance expenditure, the government should explore the region's revenue sources through original revenue (PAD).This study aims to prove empirically the influence of the original revenue (PAD) to capital expenditure it's implications to maintenance expenditure. This research was conducted in The Local Government Of Cirebon.

The sampling method is a saturated sampling using budget realization report quarterly of the Original Revenue (PAD), Capital Expenditures and Maintenance Expenditure The Local Government Of Cirebon from 2006 to 2013 total of 32 samples. Testing is done with path analysis (Path Analysis) and analysis sobel (Sobel Test). The analysis process using the software SPSS 20.0 for windows.

The results of path analysis showed that the original revenue (PAD) significantly and positively related to capital expenditures, and capital expenditures have a significant effect and positively related to maintenance expenditures. Then from the results of sobel analysis showed that the original revenue (PAD) significantly and positively related to maintenance expenditures through capital expenditures.

*Keywords **:** Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, Maintenance Expenditure*

I. Pendahuluan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 2001 pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran pemerintah daerah dari sistem anggaran tradisional menjadi sistem anggaran berbasis kinerja (Halim & Abdullah, 2006). Selain itu, perwujudan dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah dengan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Darwanto & Yulia, 2007).

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk membiayai program kegiatan dalam tahun anggaran tertentu (Halim &Abdullah, 2006). Dalam hal ini APBD tidak hanya akan berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaan, namun sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah, contohnya seperti menyediakan dan membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD (Dirjen Perimbangan Keuangan RI, 2013).

Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya (Darwanto & Yulia, 2007). Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan belanja modal baik untuk mengganti aset lama maupun pembelian aset baru sehingga aset

pemerintah daerah bertambah nilainya dari tahun ke tahun (Rustiyaningsih, 2012). Sehingga dapat dikatakan aset tetap pemerintah daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBD merupakan *output/outcome* dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahun anggarannya (Abdullah & Halim, 2006).

Peningkatan aset Pemerintah Daerah semestinya juga semakin meningkatkan belanja pemeliharaan terhadap aset tersebut dari tahun ke tahun meskipun mungkin peningkatan keduanya tidaklah proporsional, karena pengalokasian belanja modal berhubungan dengan pengalokasian belanja pemeliharaan terhadap aset (Rustiyaningsih, 2012). Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap, artinya jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun atau jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester (Abdullah & Halim, 2006).

Namun fenomena yang terjadi adalah realisasi anggaran belanja modal setiap tahunnya pada pemerintah kabupaten/kota sering tidak diikuti dengan penambahan belanja pemeliharaan atau meskipun belanja pemeliharaan daerah meningkat bahkan dapat terealisasi 100% tetapi tidak menjamin aset pemerintah daerah tersebut dapat terpelihara dengan baik (Rustiyaningsih, 2012). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih adanya gedung-gedung yang tidak terawat sebagaimana mestinya, karena dana yang tersedia hanya diperuntukan bagi pembangunan tanpa adanya dana yang cukup untuk melakukan perawatan dalam tahun berjalan atau adanya penyelewengan belanja pemeliharaan yang tidak digunakan untuk semestinya (Timbul Sinaga & Rimbun, 2012).

Fenomena yang terjadi di Kota Cirebon yaitu pada tahun 2013 belanja modal dan belanja pemeliharaan Kota Cirebon sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pada kenyataannya kenaikan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan pemeliharaan fasilitas umum untuk masyarakat seperti pemeliharaan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kota Cirebon. Kepala Dishubinkom Kota Cirebon M. Taufan Bharata mengatakan anggaran untuk PJU masih kurang, dana perawatan PJU di Kota Cirebon dari APBD Kota Cirebon hanya Rp269 juta/tahun, padahal terdapat sekitar 3.400 unit PJU di wilayah kota yang membutuhkan biaya perawatan minimal Rp600 juta/tahun (Erika Lia, 2013).

Oleh karena itu, guna menunjang ketersediaannya pengalokasian dana untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan, Pemerintah Daerah melalui pendapatan daerah juga, sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak darah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Ebit, Darwanis & Jalaluddin, 2012). Sehingga dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2009:73).

Saat ini banyak daerah yang berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya sendiri, karena salah satu faktor pendukung kesejahteraan daerah adalah dengan tersedianya infrasruktur yang memadai (Justonly, David & Stanly, 2013). Namun faktanya seperti yang dilansir dalam wartaekonomi.co.id, masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada sektor-sektor yang kurang diperlukan dan lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, sebab dari 100% belanja daerah rata-rata hanya 20% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan asset untuk investasi untuk meningkatkan pelayan publik (Alnisa Septya, 2013).

Hal tersebut terjadi di Pemerintah Kota Cirebon, menurut Wakil Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis belanja pegawai di Kota Cirebon masih sangat tinggi. Pada tahun 2013 anggaran belanja modal Kota Cirebon memang sudah cukup besar namun belum mencapai 28%, sedangkan hampir 60% dialokasikan untuk belanja pegawai. Dan diakui pula bahwa besarnya

belanja pegawai ini fluktuatif dari tahun ke tahunnya, namun belum pernah seimbang dengan belanja modal untuk kebutuhan publik (Muhamad Syahri Romdhon, 2013).

Selain itu pada tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal Kota Cirebon sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pada kenyataannya kenaikan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan pelayanan kepada masyarakat, salah satu kasusnya yaitu buruknya pengadaan air bersih di Kota Cirebon. Seperti dilansir dalam radarcirebon.com yang mengabarkan protes warga kecamatan Kejaksan mengenai buruknya pelayanan PDAM Kota Cirebon, Hal ini terjadi karena sudah beberapa tahun layanan air di daerah padat penduduk itu, tak kunjung membaik. Menurut penuturan salah seorang warga yang bernama Wihasti Laksita mengatakan bahwa air PDAM mulai mengalir pukul 23.00 WIB hingga dini hari. Bahkan belakangan ini, aliran air semakin kecil, kadang satu hari tidak mengalir sedikit pun. Wihasti berharap, Pemerintah Kota dalam hal ini PDAM bisa segera memperbaiki layanan yang ada, mengingat air adalah kebutuhan utama masyarakat (Irvan, 2013).

Sehingga hal tersebut sangat disayangkan mengingat peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam meningkatkan kesejahteraan pada daerahnya sendiri adalah dengan meningkatkan investasi belanja modal pada Pemerintah Daerah sehingga kualitas layanan publik daerah menjadi semakin baik (Subowo & Endar, 2010). Solikin, (2007:7) menyatakan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Artinya temuan tersebut mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Dan apabila pengeluaran pemerintah atas belanja modal tinggi maka akan mengakibatkan kenaikan pula pada belanja pemeliharaannya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013) yang menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Syukriy Abdullah dan Abdul Halim (2006) yang menyimpulkan bahwa belanja modal berasosiasi positif terhadap belanja pemeliharaan dan menunjukkan bahwa hubungan asosiatif antara belanja modal dan belanja pemeliharaan adalah *robust* (kuat).

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan konsep-konsep tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut: **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Belanja Pemeliharaan (Studi Pada Pemerintah Kota Cirebon)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon.
2) Seberapa besar pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon.
3) Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan, mengolah, serta menganalisis data yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Pada Pemerintah Kota Cirebon)".

1.3.2 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon.
2) Untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon.

3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon.

1.4 Keguanaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sumbangan masukan untuk membantu pihak manajemen publik terutama untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal dan implikasinya terhadap belanja pemeliharaan pada Pemerintah Kota Cirebon.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bukti empiris dalam bidang akuntansi sektor publik, khusunya dalam bidang akuntansi keuangan daerah dan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

II. Kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 (pasal 1) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

> "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalamnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 (pasal 6) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2.1.2 Belanja Modal

Menurut Halim dan Kusufi (2012:107), pengertian belanja modal adalah sebagai berikut:

> "Belanja modal merupakan pengeluaran untuk perolehan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: 1) belanja modal tanah, 2) belanja modal peralatan dan mesin, 3) belanja modal gedung dan bangunan, 4) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, 5) belanja modal aset tetap lainnya".

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap, alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas dan pelayanan publik (Darwanto dan Yulia, 2007).

2.1.3 Belanja Pemeliharaan

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 (pasal 1) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengertian belanja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

> "Belanja pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna".

Jenis belanja pemeliharaan menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut:

" 1. Pemeliharaan tanah. Contohnya pemagaran, pemeliharaan tanah tandus/rusak, pemeliharaan tanah pertanian, pemeliharaan tanah perkebunan, dan lainnya.
2. Pemeliharaan peralatan dan mesin.
3. Pemeliharaan gedung dan bangunan.
4. Pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan.
5. Pemeliharaan aset tetap lainnya".

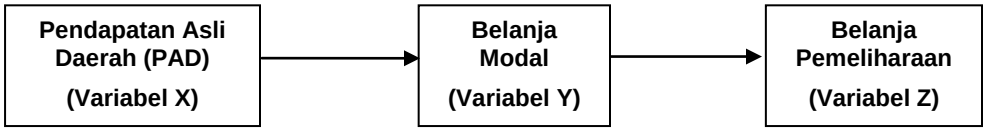
2.2 Kerangaka Pemikiran

PAD ini merupakan sumber penerimaan daerah yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri berdasarkan potensi, jenis dan tarif pungutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam UU No. 33 Tahun 2004 (pasal 3), PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Untuk itu, PAD harus diupayakan agar selalu meningkat, hal ini karena PAD digunakan untuk membiayai belanja atau pengeluaran daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat salah satunya melalui belanja modal.

Pemerintah daerah memberikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Anggaran belanja modal yang terealisasi setiap tahunnya akan menujukkan adanya penambahan aset tetap suatu daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara *financial*. Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Dalam hal ini pemerintah daerah bukan hanya menganggarkan untuk belanja modal saja tetapi juga harus diikuti dengan penambahan belanja pemeliharaan sehingga aset pemerintah daerah yang dimiliki tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kegunaannya. Untuk mendapatkan aset tetap, Pemerintah Daerah cukup merealisasikan anggaran belanja modal pada tahun berjalan sedangkan untuk belanja pemeliharaan Pemerintah Daerah harus mengeluarkan secara rutin dan terus-menerus selama aset tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga penambahan jumlah aset Pemerintah Daerah setiap tahunnya seharusnya juga meningkatkan jumlah anggaran belanja pemeliharaan.

Berdasarkan Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan atau menggambarkan paradigma dari penelitian ini:



Bahtiar Arif, Muchlis dan Iskandar (2009)

Abdul Halim (2004)

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan, teori, konsep, serta kerangka pemikiran yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon.

H_2 = Belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

H_3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal pada Pemerintah Kota Cirebon.

III. Objek dan metode penelitian

3.1 Objek Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, seorang peneliti harus dapat menentukan objek penelitiannya. Ini dimaksudkan agar setiap penelitian yang kita lakukan dapat terselesaikan dengan baik dan benar serta terarah dan fokus terhadap permasalahan yang terjadi atas objek penelitian.

Menurut Husein Umar (2005:303), pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut:

"Objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika perlu".

Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Belanja Pemeliharaan pada Pemerintah Kota Cirebon.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Menurut Umi Narimawati (2010:29), pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

"Metode penelitian merupakan cara penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data untuk mencapai tujuan tertentu".

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode statistik deskriptif dan metode statistik verifikatif.

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian sangat perlu dilakukan perencanaan dan perancangan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Menurut Silalahi (2009:180), pengertian desain penelitian adalah sebagai berikut:

"Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti akan dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya".

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar.

Tabel 3.1
Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
(Variabel X) Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalamnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **UU No. 33 Tahun 2004 (Pasal 1)Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**	- Pajak daerah - Retribusi daerah - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah **UU No. 33 Tahun 2004 (Pasal 6)Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.**	Rasio
(Variabel Y) Belanja Modal	Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	- Belanja modal tanah - Belanja modal peralatan dan mesin - Belanja modal gedung dan bangunan - Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rasio

		- Belanja modal aset tetap lainnya **Halim dan Kusufi, (2012:107)**	
	Halim dan Kusufi (2012:107)		
(Variabel Z) Belanja Pemeliharaan	Belanja pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. **Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah**	- Pemeliharaan tanah - Pemeliharaan peralatan dan mesin - Pemeliharaan gedung dan bangunan, - Pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan - Pemeliharaan aset tetap lainnya. **Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Rasio

3.2.3 Sumber danTeknik Penentuan Data

3.2.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2010:137), pengertian sumber sekunder adalah sebagai berikut:

> "Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen".

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi berupa Laporan Realisasi Anggaran Pertriwulan PAD, Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan, serta gambaran umum instansi, aktivitas dan dokumen-dokumen terkait dengan penelitian dari Pemerintah Kota Cirebon.

3.2.3.2 Teknik Penentuan Data

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan data. Oleh karena itu, seorang peneliti memerlukan populasi dari data yang akan diteliti. Tetapi dalam menentukan populasi tersebut tidak semua kita ambil, kita hanya akan mengambil sampel yang akan kita jadikan bahan analisis dalam menentukan kesimpulan dari variabel-variabel yang peneliti ambil.

Adapun teknik penentuan data terbagi menjadi dua bagian, yaitu populasi dan sampel. Pengertian dari populasi dan sampel itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Populasi

Menurut Umi Narimawati (2010:37), pengertian populasi adalah sebagai berikut:

> "Objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti, sebagai unit analisis penelitian".

Populasi yang digunakan adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pertriwulan PAD, Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan Pertriwulan Pemerintah Kota Cirebon dari tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun anggaran 2013, sehingga jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 populasi.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:118), pengertian sampel adalah sebagai berikut:

> "Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Teknik yang akan digunakan oleh penulis sesuai dengan judul adalah *nonprobability sampling*. Jenis *nonprobability sampling* yang akan digunakan oleh penulis adalah sampling jenuh.

Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Dalam penelitian ini

menggunakan sampling jenuh karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel. Oleh karena itu peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, yaitu sebanyak 32 sampel.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Untuk menunjang hasil penelitian, maka dilakukan pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu:

1. Penelitian lapangan (*Field Research***)**
   Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di perusahaan/instansi yang menjadi objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang diperoleh dengan cara:
   a. Observasi
   b. Dokumen-dokumen
2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
   Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, catatan kuliah dan literatur serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.2.5 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

3.2.5.1 Rancangan Analisis

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. Analisis verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path* analysis) dan analisis Sobel (s*obel test)*, namun sebelum melakukan analisis jalur dan analisis sobel dilakukan pengujian normalitas data terlebih dahulu. Adapun langkah-langkah analisis verifikatif yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Menurut Singgih Santoso (2002:393), dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*), yaitu:

a) Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari populasi adalah normal.
b) Jika probabilitas < 0,05 maka populasi tidak berdistribusi secara normal

Selain itu uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang diambil berasal dari populasi berdistribusi normal. Uji yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.

b. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Untuk melakukan analisis data, pengolahan data dilakukan menggunakan analisis jalur (*path analysis*). Belanja modal diposisikan sebagai variabel intervening yang menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen. Metode *path analysis* merupakan perluasan regresi linier berganda yang digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel dalam model penelitian yang dibangun berdasarkan landasan teori yang kuat. Adapun langkah-langkah menguji *path analysis* adalah sebagai berikut:

1) Nilai Korelasi *Pearson*

Analisis korelasi *pearson* digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara variabel bebas (*independent*) dengan variabel terikat (*dependent*). Interprestasi dari nilai koefisien korelasi :

a. Kalau r = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua variabel kuat dan mempunyai hubungan yang berlawanan (jika X naik maka Y turun atau sebaliknya).

b. Kalau r = +1 atau mendekati +1, maka hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y dan hubungannya searah.

Ketentuan untuk melihat tingkat keeratan korelasi digunakan acuan pada Tabel 3.2:

Tabel 3.2
Tingkat Keeratan Korelasi

0 – 0,20	Sangat rendah (hampir tidak ada hubungan)
0,21 – 0,40	Korelasi yang lemah
0,41 – 0,60	Korelasi sedang
0,61 – 0,80	Cukup tinggi
0,81 - 1	Korelasi tinggi

Sumber: Syahri Alhusin (2003: 157)

2) Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Besarnya koefisien determinasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati (2010:50)

Dimana :

Kd = Koefisien Determinasi

r = Koefisien Korelasi

3) Merumuskan Dan Menggambarkan Persamaan Struktural

a) Sesuai dengan kerangka pemikiran maka dapat membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Dua persamaan tersebut sebagai berikut:

$$Z = \rho_{ZY}Y + \rho_{Z}\varepsilon_2 \quad \text{dan} \quad Y = \rho_{YX}X + \rho_{Y}\varepsilon_1$$

Sumber : Riduwan & Kuncoro (2012:5)

Dimana:

X = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Y = Belanja Modal

Z = Belanja Pemeliharaan

ρ = Koefisien Korelasi

Pada kedua persamaan tersebut terdapat *unexplained variance* yang dimiliki oleh ε_1 dan ε_2 digunakan untuk mewakili variabel lain yang berpengaruh terhadap Y dan Z tetapi variabel tersebut tidak dilibatkan dalam model penelitian.

b) Menggambar diagram jalur lengkap, menentukan sub-sub strukturnya dan merumuskan persamaan strukturnya sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

c. Analisis Sobel (*Sobel Test*)

Analisis sobel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel mediator yaitu belanja modal. Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan Uji Sobel (*Sobel Test*). Uji Sobel ini dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel *independent* (X) kepada variabel *dependent* (Z) melalui variabel intervening (Y). Pengaruh tidak langsung X ke Z melalui Y dihitung dengan cara mengalikan jalur $X \rightarrow Y$ (a) dengan jalur $Y \rightarrow Z$ (b) atau ab. Jadi Koefisien ab = (c-c^1), dimana c adalah pengaruh X terhadap Z tanpa mengontrol Y, sedangkan c^1 adalah koefisien pengaruh X terhadap Z setelah mengontrol Y. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*) Sab dihitung dengan rumus berikut ini:

$$Sab = \sqrt{a^2sb^2 + b^2sa^2 + sa^2sb^2}$$

Sumber : Sobel (1982)

Dimana:

a = Koefisien korelasi X → Y
b = Koefisien korelasi Y → Z
ab = Hasil perkalian Koefisien korelasi X → Y dengan Koefisien korelasi Y → Z
Sa = Standar error koefisien a
Sb = Standar error koefisien b
Sab = Standar error tidak langsung (*indirect effect*)

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung maka menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t_{hitung} dibandingkan dengan t_{tabel} dan jika t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi.

3.2.5.2 Pengujian Hipotesis

1. Menetapkan Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka peneliti menetapkan tiga hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, dengan perumusan sebagai berikut:

a. H_0 : $\rho yx = 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.
   H_a : $\rho yx \neq 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal.
b. H_0 : $\rho zy = 0$ Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan.
   H_a : $\rho zy \neq 0$ Belanja Modal berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan.
c. H_0 : $\rho zy.\ \rho yx = 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan melalui Belanja Modal
   H_a : $\rho zy.\ \rho yx \neq 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan melalui Belanja Modal.

2. Menentukan Tingkat Signifikan

Ditentukan dengan 5% dari derajat bebas (dk) = n – k – l, untuk menentukan t_{tabel} sebagai batas daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05 atau 5% karena dinilai cukup untuk mewakili hubungan variabel-variabel yang diteliti dan merupakan tingkat signifikasi yang umum digunakan dalam suatu penelitian. Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t yang dihitung dengan rumus:

$$t_{hitung} = r_{xy} \times \sqrt{\frac{n-2}{1-(r_{xy})^2}}$$

Sumber : Sugiyono (2008:184)

Keterangan:

t = Nilai uji t
r = Koefisien korelasi
n = Jumlah sampel

3. Menggambar Daerah Penerimaan Dan Penolakan

Untuk menggambar daerah penerimaan dan penolakan maka dilakukan perbandingan antara hasil t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka Ho ada di daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya antara variabel X dan variabel Y ada pengaruhnya.
b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka Ho ada di daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
c. t_{hitung}, dicari dengan rumus perhitungan t_{hitung}, dan
d. t_{tabel}, dicari di dalam tabel distribusi $t_{student}$ dengan ketentuan sebagai berikut, α = 0,05 dan dk = (n-k-1).

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Hasil uji normalitas data untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X) diperoleh d hitung sebesar 0,182 dengan signifikansi uji adalah 0,237. Diperoleh signifikansi uji lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X) berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data untuk variabel Belanja Modal (Y) diperoleh d hitung sebesar 0,126 dengan signifikansi uji adalah 0,687. Diperoleh signifikansi uji lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel Belanja Modal (Y) berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas data untuk variabel Belanja Pemeliharaan (Z) diperoleh dhitung sebesar 0,148 dengan Signifikansi uji adalah 0,487. Diperoleh signifikansi uji lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data variabel Belanja Pemeliharaan (Z) berdistribusi normal.

4.1.3.1 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon dilakukan langkah perhitungan sebagai berikut:

1) Nilai Korelasi Antar Variabel

Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil perhitungan korelasi variabel X (Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cirebon) dan Y (Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon) dengan menggunakan software *SPSS 20.0 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.1
Korelasi Antara Variabel X dengan Y

Correlations

		Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cirebon (X)	Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cirebon (X)	Pearson Correlation	1	,699**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	32	32
Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)	Pearson Correlation	,699**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	32	32

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil perhitungan korelasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon = 0,699, ini berarti terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon. Jika diinterpretasikan korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon adalah cukup erat karena berkisar antara 0,61– 0,80, dan arahnya positif.

2) Koefisien Jalur

Model struktural yang diteliti hanya terdiri atas satu variabel independen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka nilai koefisien jalur sama dengan koefisien korelasi.

Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 20.0 for windows* diperoleh koefisien jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X) terhadap Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y) seperti ditunjukan oleh nilai *standardized coefficients* pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Koefisien Jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13689523418.758	2912173976.681		4.701	.000
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cirebon (X)	.545	.102	.699	5.355	.000

a. Dependent Variable: Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)

Hasil perhitungan koefisien jalur yang diperoleh (P_{YX}) sebesar 0,699 merupakan bobot pengaruh langsung variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon.

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari kuadrat koefisien jalur. Jadi koefisien determinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$R^2 = P_{YX}{}^2 = 0{,}699^2 = 0{,}489$

Selain pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain diperoleh melaui perhitungan sebagai berikut:

$$P_{Y\varepsilon} = \sqrt{1 - R_{yx}^2}$$

$$P_{Y\varepsilon} = \sqrt{1 - 0{,}489} = 0{,}715.$$

Nilai koefisien determinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon dari hasil pengolahan data menggunakan software *SPSS 20.0 for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Koefisien Determinasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699[a]	.489	.472	7317542561.71710

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X)

Nilai koefisien determinasi merupakan besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan pengaruh sebesar 48,9% terhadap Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini berarti jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon juga. Dan sisanya sebesar 51,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan transfer,lain-lain pendapatan yang sah, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama dapat ditulis sebagai berikut:

Y = 0,699X + 0,715

Keterangan:

Y = Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon
X = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4) Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon signifikan atau tidak, dilakukan pengujian dengan uji t. Nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan db = n–k–1 = 32-1-1 = 30 sebesar 2,042.

$$t = \frac{0,699}{\sqrt{\frac{(1-0,489)}{32-2}}} = 5,355$$

Hasil perhitungan statistik uji t untuk X (t_{hitung} Pendapatan Asli Daerah (PAD)) diperoleh sebesar 5,355 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,000. Nilai t_{hitung} (5,355) lebih besar dari t_{tabel} (2,042). Jadi diperoleh keputusan uji adalah menolak H_0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,000) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon. Dimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon berbanding lurus (positif).

4.1.3.2 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon

Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon dilakukan langkah perhitungan sebagai berikut:

1) Nilai Korelasi Antar Variabel

Berdasarkan data penelitian diperoleh hasil perhitungan korelasi variabel Y (Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon) dan Z (Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon) dengan menggunakan software *SPSS 20.0 for windows* sebagai berikut:

Tabel 4.4
Korelasi Antara Variabel Y dengan Z

Correlations

		Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)	Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon (Z)
Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)	Pearson Correlation	1	,562**
	Sig. (2-tailed)		,001
	N	32	32
Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon (Z)	Pearson Correlation	,562**	1
	Sig. (2-tailed)	,001	
	N	32	32

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil perhitungan korelasi antara Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon dengan Belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon = 0,562, ini berarti terdapat hubungan antara Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon dengan Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon. Jika diinterpretasikan kuatnya korelasi Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon adalah sedang karena berkisar antara 0,41– 0,60 dan arahnya positif.

2) Koefisien Jalur

Model struktural yang diteliti hanya terdiri atas satu variabel independen yaitu variabel Belanja Modal, maka nilai koefisien jalur sama dengan koefisien korelasi. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan software *SPSS 20.0 for windows* diperoleh koefisien jalur Belanja Modal (Y) terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon (Z) seperti ditunjukan oleh nilai *standardized coefficients* pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Koefisien Jalur Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	702956178.509	362484406.600		1.939	.062
	Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)	.046	.012	.562	3.725	.001

a. Dependent Variable: Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon (Z)

Hasil perhitungan koefisien jalur yang diperoleh (P_{ZY}) sebesar 0,562 merupakan bobot pengaruh langsung variabel Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon.

3) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi diperoleh dari kuadrat koefisien jalur. Jadi koefisien determinasi Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$R^2 = P_{ZY}^2 = 0{,}562^2 = 0{,}316$

Selain pengaruh Belanja modal terhadap Belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon, terdapat pengaruh variabel lain (residu). Besar koefisien jalur untuk faktor lain diperoleh melaui perhitungan sebagai berikut:

$$P_{Z\varepsilon} = \sqrt{1 - R_{ZY}^2}$$

$$P_{Z\varepsilon} = \sqrt{1 - 0{,}316} = 0{,}827.$$

Nilai koefisien determinasi Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon dari hasil pengolahan data menggunakan software *SPSS 20.0 for windows* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Koefisien Determinasi Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562[a]	.316	.293	691506848.24595

a. Predictors: (Constant), Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon (Y)

Nilai koefisien determinasi merupakan besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Belanja Modal memberikan pengaruh sebesar 31,6% terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini berarti jika Belanja Modal semakin besar maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon, sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar belanja modal yaitu belanja operasi, belanja tidak terduga, nilai aset dan lain sebagainya. Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua dapat ditulis sebagai berikut:

Z = 0,562Y + 0,827

Keterangan:

Z = Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon
Y = Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

4) Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon signifikan atau tidak, dilakukan pengujian dengan uji t. Nilai t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan db = n–k–1 = 32-1-1 = 30 sebesar 2,042.

$$t = \frac{0{,}562}{\sqrt{\frac{(1-0{,}316)}{32-2}}} = 3{,}725$$

Hasil perhitungan statistik uji t untuk Y (t_{hitung} Belanja Modal) diperoleh sebesar 3,725 dengan nilai signifikansi (p-value) = 0,001. Nilai t_{hitung} (3,725) lebih besar dari t_{tabel} (2,042). Jadi diperoleh keputusan uji adalah menolak H_0. Kesimpulan di atas didukung pula dari nilai signifikansinya (0,001) yang lebih kecil dari nilai α = 0,05.

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon. Dimana pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon berbanding lurus (positif).

4.1.3.3 Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeliharaan Melalui Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon dan implikasinya pada Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon diperoleh dari perkalian pengaruh X terhadap Y dengan Y terhadap Z. Koefisien jalur yang diperoleh (P_{YX}) sebesar 0,699 dan Koefisien jalur yang diperoleh (P_{ZY}) sebesar 0,562. Jadi dapat diperoleh pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon adalah 0,699 × 0,562 × 100% = 39,28%.

1) Pengujian Hipotesis

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melalui variabel Belanja Modal sebagai mediator akan dapat berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon. Pengujian terhadap pengaruh mediasi antar variabel intervening dengan variabel dependen dilakukan dengan perhitungan rumus Sobel. Hasil dari kedua pengujian diringkas sebagai berikut:

P_{YX} = 0,699 Se_{YX}= 0,102

P_{ZY} = 0,562 Se_{ZY} = 0,012

Besarnya koefisien tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon merupakan perkalian dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon, sehingga diperoleh sebagai berikut:

$$P_{ZX} = P_{YX} \times P_{ZY} = (0,699) \times (0,562) = 0,39284$$

Besarnya *standard error* tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon merupakan perkalian dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon, sehingga diperoleh sebagai berikut:

$$Se_{ZX} = \sqrt{(0,699^2 \times 0,012^2) + (0,562^2 \times 0,120^2) + (0,102^2 \times 0,012^2)}$$

$$Se_{ZX} = 0,0579474$$

Menggunakan nilai-nilai yang telah dihitung dapat diperoleh nilai uji t sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{P_{ZX}}{Se_{ZX}} = \frac{0,39284}{0,0579474} = 6,779$$

Hasil yang diperoleh untuk nilai t sebesar 6,779.

Tabel 4.7
Uji Signifikansi Pengaruh Tidak Langsung Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemeliharaan Di Pemerintah Kota Cirebon Melalui Variabel Belanja Modal Sebagai Mediator

Koefesien Jalur	t-hitung	t-tabel	Kesimpulan
0,39284	6,779	2,042	Signifikan

Nilai t_{hitung} (6,779) lebih besar dari t_{tabel} (2,042) yang berarti bahwa parameter mediasi signifikan. Maka dengan demikian model pengaruh tidak langsung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon melalui variabel Belanja Modal sebagai mediator dapat diterima (signifikan). Jadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Pemeliharaan melalui Belanja Modal.

Besarnya pengaruh tidak langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon melalui Belanja modal adalah 39,28%.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja modal adalah sebesar 0,699. Tingkat keeratan korelasi 0,699 termasuk kedalam kategori cukup karena berkisar antara 0,61 – 0,80. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan variabel belanja modal adalah searah. Artinya apabila terdapat kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan diikuti pula oleh kenaikan pada belanja modalnya.

Hasil dari koefisien determinasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal dengan besar pengaruh 48,9%. Sedangkan sisanya sebesar 51,1% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi belanja modal, seperti pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan lain sebagainya.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cirebon belum digunakan secara optimal untuk membiayai belanja modal, sehingga masih terdapat masalah-masalah mengenai kurangnya pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, salah satunya yaitu masih buruknya pengadaan air bersih bagi masyarakat mulai dari air yang keruh dan berbau tidak sedap hingga air yang tidak mengalir sama sekali (Irvan, 2013). Hal ini sangat disayangkan mengingat penyediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat.

Sehingga adanya kenaikan realisasi anggaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cirebon selama delapan tahun terakhir seharusnya diimbangi dengan kenaikan realisasi anggaran belanja modalnya, terutama pada pos belanja modal jalan, irigasi dan jaringan agar masalah mengenai penyediaan air bersih yang terjadi hampir setiap tahun dapat diatasi. Disamping itu dengan meningkatnya anggaran untuk belanja modal maka dapat menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana umum agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah (2013), serta Subowo dan Endar Rosita Wati (2010). Kemudian penelitian ini diperkuat oleh teori penghubung menurut Bahtiar Arif, Muchlis dan iskandar (2009).

4.2.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi belanja modal dengan belanja pemeliharaan adalah sebesar 0,562. Tingkat keeratan korelasi 0,562 termasuk kedalam kategori sedang karena berkisar antara 0,41 – 0,60. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel belanja modal dengan variabel belanja pemeliharaan adalah searah. Artinya apabila terdapat kenaikan pada belanja modal, maka akan diikuti pula oleh kenaikan pada belanja pemeliharaannya.

Hasil dari koefisien determinasi, belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja pemeliharaan dengan besar pengaruh 31,6%. Sedangkan sisanya sebesar 68,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi belanja pemeliharaan, seperti belanja operasi, belanja tidak terduga dan lain sebagainya.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon belum terlalu mempengaruhi penambahan belanja pemeliharaannya, sehingga masih terdapat fasilitas umum bagi masyarakat yang kurang terpelihara, salah satunya yaitu kurangnya pemeliharaan untuk 3.400 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) (Erika Lia, 2013). Hal ini tentu saja akan sangat membahayakan mengingat PJU ini dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di malam hari, agar terhindar dari kecelakan ataupun tindak kriminalitas.

Sehingga diharapkan bagi Pemerintah Kota Cirebon agar memperhatikan pula penyediaan anggaran untuk belanja pemeliharaan terutama pada belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan agar PJU kota Cirebon dapat lebih terpelihara. Di samping itu, adanya dana untuk belanja pemeliharaan, aset tetap atau inventaris pemerintah daerah sebagai hasil dari

belanja modal dapat terawat dengan baik sehingga dapat digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Abdul Halim dan Syukriy Abdullah (2006), serta Timbul Sinaga dan Rimbun C.D. Sidabutar (2012). Kemudian penelitian ini diperkuat oleh teori penghubung menurut Halim (2004).

4.2.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemeliharaan melalui Belanja Modal di Pemerintah Kota Cirebon

Berdasarkan perhitungan dari tingkat signifikansi dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal memiliki korelasi yang sedang yaitu sebesar 39,28%, sedangkan sisanya sebesar 60,72% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi belanja pemeliharaan, seperti pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah dan lain sebagainya.

Berdasarkan perhitungan dari koefisen korelasi menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja pemeliharaan adalah searah. Artinya apabila terdapat kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan diikuti oleh kenaikan pada belanja modalnya dan apabila belanja modal mengalami kenaikan maka akan diikuti pula oleh belanja pemeliharaannya.

Fenomena yang ada menyebutkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terus menerus selama delapan tahun terakhir tidak diimbangi dengan kenaikan belanja pemeliharaannya yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya selama delapan tahun terakhir.

Hal ini sangat disayangkan, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintah Kota Cirebon yang selalu mengalami kenaikan secara terus menerus selama delapan tahun terakhir yang menandakan adanya pertumbuhan yang positif pada PAD Kota Cirebon, sehingga diharapkan bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan anggaran belanja pemeliharaannya sehingga aset tetap atau barang milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun untuk fasilitas publik dapat lebih terpelihara.

V. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan berkaitan dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal dan Implikasinya Pada Belanja Pemeliharaan Pada Pemerintah Kota Cirebon, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Pengaruhnya cukup besar dan sisanya dipengaruhi oleh pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya.. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki hubungan positif terhadap belanja modal, artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon akan semakin besar pula. Namun, belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon belum optimal, padahal selama delapan tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan selalu meningkat setiap tahunnya.
2. Belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja pemeliharaan. Pengaruhnya sedang dan sisanya dipengaruhi oleh belanja operasi, belanja tidak terduga, nilai aset dan lain sebagainya. Selain itu, belanja modal memiliki hubungan positif terhadap belanja pemeliharaan, artinya semakin besar belanja modal maka belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon akan semakin besar pula. Namun, masih banyaknya fasilitas publik yang kurang terawat menandakan kurangnya anggaran yang dikeluarkan untuk belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cirebon berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal. Pengaruhnya sedang dan sisanya dipengaruhi oleh

pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hubungan positif terhadap belanja pemeliharaan melalui belanja modal, artinya semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka belanja modal di Pemerintah Kota Cirebon akan semakin besar dan dengan semakin besarnya belanja modal maka belanja pemeliharaan di Pemerintah Kota Cirebon akan semakin besar pula. Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya selama delapan tahun terakhir tidak diimbangi dengan belanja pemeliharaannya yang cenderung mengalami penurunan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai bahan evalusi antara lain:

1. Adanya kenaikan realisasi anggaran pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Cirebon selama delapan tahun terakhir seharusnya diimbangi dengan kenaikan realisasi anggaran belanja modalnya, terutama pada pos belanja modal jalan, irigasi dan jaringan agar masalah mengenai penyediaan air bersih yang terjadi hampir setiap tahun dapat diatasi. Disamping itu dengan meningkatnya anggaran untuk belanja modal maka dapat menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana umum agar tercapainya kesejahteraan masyarakat
2. Diharapkan bagi Pemerintah Kota Cirebon agar memperhatikan pula penyediaan anggaran untuk belanja pemeliharaan karena dengan adanya dana untuk belanja pemeliharaan, aset tetap atau inventaris pemerintah daerah sebagai hasil dari belanja modal dapat terawat dengan baik sehingga dapat digunakan sesuai dengan estimasi umur ekonomisnya.
3. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama delapan tahun terakhir secara terus menerus menandakan adanya pertumbuhan yang positif pada PAD Kota Cirebon, sehingga diharapkan bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan anggaran belanja pemeliharaannya sehingga aset tetap atau barang milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun untuk fasilitas publik dapat lebih terpelihara.

VI. Daftar Pustaka

Abdul Halim dan Syukriy Abdullah. 2006. Studi atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. ISSN: 0216-8642, Vol. 2, No. 2, p. 17 -32.

Alnisa Septya Ratu. 2013. *Porsi APBD Untuk Belanja Pegawai Terbesar 2013 Dominan Terjadi di Jawa dan Sumatera*. Senin, 22 Juli 2013. (http://wartaekonomi.co.id).

Arif, Bahtiar, Muchlis dan Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia.

Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar 26-28 Juli 2007.*

Dirjen Perimbangan Keuangan RI. 2013. *Laporan Evaluasi Belanja Modal Daerah.*

Ebit Julitawati, Darwanis dan Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadapa Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-0164, Vol. 1 No. 1, p. 1-15. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Erika Lia. 2013. *Ribuan PJU di Kota Cirebon Belum Menyala*. Jumat, 2 Agustus 2013. (http://daerah.sindonews.com).

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi.* Jakarta: Salemba Empat.

Halim, Abdul. dan M. Kusufi, Syam. 2012. *Akuntansi Sektor Publik:* Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, Edisi 4.

Husein, Umar. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Irvan. 2013. *Warga Samadikun Tagih Janji PDAM.* Senin, 14 Oktober 2013, (www.radarcirebon.com).

Justonly Lengkong, David Paul Elia Saerang, Stanly Alexander. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Propinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.* ISSN: 1907-9737, Vol. 8, No. 3, p. 72-79. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi.

Mawarni, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi*. ISSN: 2302-0164, Vol. 2, No. 2, p. 80-90. Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Muhamad Syahri Romadhon. 2013. *Bea Pegawai Tinggi, Kota Cirebon Minim Tenaga Ahli.* Selasa, 30 April 2013. (http://m.inilah.com).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Riduan dan Kuncoro, Engkos Achmad. 2012. *Cara Menggunakan dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur)*. Bandung: Alfabeta.

Rustiyaningsih, Sri. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Belanja Pemeliharaan (Studi Empiris Pada Pemerintaha Daerah Jawa Timur). *Widya Warta*. ISSN: 0854-1981, No. 2, p. 195-209.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sinaga, Timbul dan Rimbun C.D Sidabutar. 2012. Pengaruh Belanja Kendaraan Dinas dan Nilai Kendaraan Dinas Terhadap Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pada Dinas Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. ISSN: 2086-6879, Vol. 3, No. 1, p. 11-22. Universitas HKBP Nommensen.

Singgih Santoso. (2002). *SPSS Statistik Multivariat.* Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.

Sobel, Michael E. (1982). Asymptotic Confidence Intervals for Indirect Effects in Structural Equation Models. *Sociological Methodology*. Vol.13, p: 290–312.

Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.*Jurnal Eksklusif Vol.4 No.4*. Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Slipi. Jakarta.

Subowo dan Endar Rosita Wati. 2010. Hubungan Antara PAD dan Dana Perimbangan Dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. ISSN: 2085-3277, Vol. 2, No. 2, p. 73-82. Universitas Negeri Semarang.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan* : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-14.

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Aplikasi Pada Fakultas Ekonomi UNIKOM. Jakarta: Genesis.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.